

## **DEMOKRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK: MENGKRITISI POPULISME**

*Oleh: Datu Hendrawan*

*Fakultas Filsafat  
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya*

### **Abstrak**

Demokrasi pada dasarnya adalah sistem yang menempatkan rakyat (demos) sebagai penguasa tertinggi sekaligus kekuatan utama dalam pemerintahan. Tulisan ini hendak mengkritisi fenomena populisme yang terjadi dalam Demokrasi. Gerakan populisme kanan menjadi ancaman bagi negara hukum demokrasi karena kekuatannya untuk menekan parlemen, mendikte pemerintah, mengintimidasi pengadilan dan kepolisian. Dalam teori diskursus dan demokrasi deliberatif Habermas menyarankan memaksimalkan *public use of reason* sebagai dasar bagi penentuan kebijakan publik. Rasio komunikatif yang dibedakan dari rasio strategis seharusnya menjadi semangat yang mendasari penentuan kebijakan publik dalam negara hukum demokratis. Dalam tindakan komunikatif intensi yang ingin dicapai adalah pemahaman intersubjektif. Sementara itu gerakan-gerakan populisme justru melakukan komunikasi strategis yang seringkali manipulatif.

**Kata Kunci: Populisme, Demokrasi, Habermas**

### **Abstract**

Democracy is basically a system that places the people (demos) as the supreme ruler as well as the main power in government. This paper intends to criticize the phenomenon of populism that occurs in democracy. The right populism movement poses a threat to a democratic rule of law because of its power to suppress parliaments, dictate the government, intimidate the courts and the police. In discourse theory and deliberative democracy, Habermas suggests maximizing public use of reason as a basis for determining public policy. The communicative

ratio that is distinguished from the strategic ratio should be the spirit that underlies the determination of public policy in a democratic rule of law. In communicative action the intention to be achieved is an intersubjective understanding. Meanwhile, populist movements carry out strategic communication which is often manipulative.

**Keywords: Populism, Democracy, Habermas**

## 1. Pengantar

Rakyat adalah kekuatan utama dalam demokrasi. Demokrasi pada dasarnya adalah sistem yang menempatkan rakyat (*demos*) sebagai penguasa tertinggi sekaligus kekuatan utama dalam pemerintahan. Akan tetapi akhir-akhir ini terjadi gejala yang menggelisahkan dalam demokrasi. Di berbagai belahan dunia muncul gerakan-gerakan yang mengatasnamakan dirinya sebagai “Rakyat” (*populus*). Gerakan rakyat yang muncul atas nama rakyat tersebut disertai dengan amarah terhadap para elit. Suara-suara yang diungkapkan dalam pergerakan mengumandangkan kebencian dan mengedepankan sentimen pada yang lain (kadang juga kepada rakyat yang lain). Gejala tersebut dikenal sebagai populisme.

Di Jerman dan beberapa negara Eropa, muncul gerakan-gerakan politis yang mengedepankan sentimen rasial, Xenophobia dan Islamophobia. Kemunculan PEGIDA<sup>1</sup> adalah salah satu bentuk reaksi masyarakat atas gelombang pengungsi Timur Tengah yang kemudian menjadi gerakan politis. Partai-partai yang mengusung agenda anti imigran di Eropa berhasil mendapatkan suara yang cukup banyak dalam pemilihan umum. Beberapa di antaranya bahkan menjadi pemenang pemilihan. Eropa yang dibangun dengan tradisi demokrasi yang panjangpun tidak terhindar dari populisme.

Di Inggris terjadi referendum yang berakhir pada keputusan pada lepasnya Inggris dari Uni-Eropa (*Brexit*). Alasan utama bagi para pemilih yang menghendaki lepasnya Inggris adalah karena merasa kepentingannya sebagai sebuah bangsa kurang terwakili. Kebijakan lepasnya Inggris dari Uni-Eropa merupakan kebijakan yang langsung melibatkan masyarakat. Tidak lama setelah hasil referendum diumumkan, masyarakat Inggris dihadapkan pada munculnya wacana mengenai konsekuensi-konsekuensi yang harus dijalani dari keputusan tersebut. Setelah mengetahui konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggung, banyak pemilih

<sup>1</sup> PEGIDA adalah singkatan dari *Patriotische Europäer Gegen die Islamisierung des Abendlandes* yang artinya Warga Patriotik Eropa Melawan Islamisasi di Barat. Bdk. Denny Armandanu, Mengenal PEGIDA Penggawa Aksi Anti Islam di Jerman, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150106130903-134-22663/mengenal-pegida-penggawa-aksi-anti-islam-di-jerman>, diakses pada 30 Oktober 2018 pukul 01.21

yang merasa menyesal terhadap keputusannya dalam referendum.<sup>2</sup>

Trump terpilih menjadi presiden dengan mengangkat isu-isu sentimen terhadap imigran, Islamophobia dan penolakan untuk menangani perubahan iklim. Imigran dituduh sebagai orang-orang yang ikut bertanggungjawab terhadap munculnya berbagai persoalan sosial dan ekonomi. Terkait dengan isu lingkungan hidup, Trump bahkan menganggap bahwa perubahan iklim adalah hoax dan isu tersebut diposisikan sebagai penghambat kemajuan ekonomi Amerika. Setelah Trump terpilih menjadi presiden, Trump memberlakukan serangkaian kebijakan yang populis dan menguntungkan bagi warga asli Amerika akan tetapi menimbulkan banyak persoalan bagi imigran dan ekonomi global.<sup>3</sup>

Di Asia gejala populisme dapat terlihat jelas dalam pemerintahan Duterte di Filipina. Duterte di Filipina menyuarakan sentimen-sentimen kepada kaum klerus dan sentimen terhadap agama (khususnya Katolik). Duterte juga mengeluarkan kebijakan yang kontroversial dalam rangka memerangi kejahatan dan narkoba. Dalam kebijakan tersebut, para pengedar narkoba dan orang-orang yang dicurigai terlibat dalam aksi kejahatan disebut akan ditembak di tempat. Sebagai akibatnya sebanyak 20.000 orang yang dicurigai terlibat dalam bisnis narkoba dibunuh. Sebagian besar dari mereka dibunuh tanpa ada proses pengadilan terlebih dahulu.<sup>4</sup>

Di Indonesia sentimen-sentimen agama dan ras dimainkan sedemikian rupa untuk kepentingan mendulang suara dan citra para tokoh politik sekaligus merobohkan lawan politik. Pilkada DKI Jakarta adalah salah satu contoh populisme yang memunculkan sentimen agama dan rasial.<sup>5</sup> Setelah Pemilihan Umum, sentimen-sentimen tersebut masih terpelihara di masyarakat. Keputusan-keputusan kebijakan publik yang diambil Gubernur terpilih nampak lebih mengedepankan sentimen-sentimen terhadap Gubernur sebelumnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan penetapan kebijakan-kebijakan yang cenderung menjadi lawan (*counter*) dari kebijakan Gubernur sebelumnya.

Beberapa fenomena di atas identik dengan istilah populisme. Pemimpin populis menempatkan diri sebagai orang yang menjadi bagian dari masyarakat yang tertindas melawan kelompok elit. Populisme adalah salah satu strategi paling efektif untuk mendulang suara. Strategi tersebut dilakukan dengan memanfaatkan sentimen-sentimen tersembunyi dalam masyarakat untuk dieksplisitkan. Pada gejala

---

<sup>2</sup> Bdk. Ed. Pascal S. Bin Saju, Hasil Penelitian: 2,3 juta Warga Inggris Menyesal Telah Memilih Brexit [https://internasional.kompas.com/read/2016/07/01/22000611/hasil\\_penelitian.2.3.juta.warga.inggris.menyosal.telah.memilih.brexit](https://internasional.kompas.com/read/2016/07/01/22000611/hasil_penelitian.2.3.juta.warga.inggris.menyosal.telah.memilih.brexit). Diakses pada 30 Oktober 2018 pukul 02.00

<sup>3</sup> Mutia Fazia, Kebijakan-Kebijakan Trump yang Mengguncang Ekonomi Global, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/19/063000726/kebijakan-kebijakan-trump-yang-mengguncang-ekonomi-global>. Diakses pada 30 Oktober 2018 pukul 02.15

<sup>4</sup> Bdk. Ted Regencia, <https://www.aljazeera.com/news/2018/02/senator-rodrigo-duterte-drug-war-kill-ed-20000-180221134139202.html>

<sup>5</sup> Bdk. Shinta Maharani, <https://nasional.tempo.co/read/1047180/alissa-wahid-cemaskan-sentimen-agama-dalam-pilkada-dan-pilpres/full&view=ok>

populisme kontemporer seperti di Indonesia, media sosial menjadi sarana yang sangat efektif untuk memperkuat identifikasi masyarakat melalui permainan wacana. Gerakan-gerakan politik identitas yang cenderung anti pluralisme tersebut kemudian mengancam stabilitas masyarakat.

Populisme merupakan sebuah konsep yang tidak sederhana. Studi mengenai populisme menghasilkan kajian-kajian dengan ruang lingkup yang sangat luas dan beragam.<sup>6</sup> Salah satu ciri khas dalam populisme adalah keterlibatan masyarakat dalam politik. Dalam populisme, rakyat seringkali diposisikan sebagai alat yang efektif bagi tercapainya kekuasaan. Para pemimpin populis memainkan berbagai macam isu yang menjadi kegelisahan tersembunyi dari masyarakat untuk disuarakan. Seringkali kegelisahan tersembunyi yang dieksplicitkan adalah terkait dengan sentimen-sentimen rasial dan agama. Hal tersebut membuat masyarakat merasa terwakili oleh sosok-sosok populis tersebut.

Beberapa kajian populisme kontemporer menunjukkan bahwa gejala populisme saat ini justru banyak terjadi di negara-negara dengan sistem pemerintahan demokratis. Beberapa model populisme yang penulis sebutkan di atas lahir dari rahim demokrasi. Gejala-gejala tersebut menunjukkan beberapa persoalan yang bagi penulis menggelisahkan. Salah satu persoalan yang menonjol dalam populisme kontemporer adalah menguatnya sentimen-sentimen dalam masyarakat yang berujung pada polarisasi masyarakat berdasarkan pandangan hidup dan pilihan politis. Sentimen yang terkait dengan agama berada pada posisi yang cukup sentral, baik sebagai pelaku maupun korban. Sebagai akibat dari politik yang mengedepankan sentimentalitas, seringkali pengambilan keputusan-keputusan kebijakan yang diambil oleh para pemimpin populis cenderung mengabaikan inklusivitas, membatasi publik dan kepentingannya dalam identifikasi tertentu sehingga berpotensi menghasilkan kebijakan yang cenderung diskriminatif atau mengabaikan masyarakat yang tidak dianggap sebagai bagian dari publik. Pada beberapa kasus, populisme juga seringkali merumuskan kebijakan secara reaksioner dan melakukan simplifikasi. Aspek rasionalitas publik (*public use of reason*) menjadi sesuatu yang tereduksi dalam beberapa kasus.

## 2. Penjelasan Mengenai Populisme

Istilah populisme sendiri merupakan salah satu istilah paling *fashionable* pada abad ini, khususnya di dunia politik dan di kalangan akademisi ilmu-ilmu sosial.<sup>7</sup> Dalam dunia politik kata ini banyak sekali digunakan dalam menganalisis arah gerak masyarakat (*populo*) dan pengaruh serta posisi para tokoh politik

<sup>6</sup> Bdk. Francisco Panizza, "Introduction" dalam Ed. Francisco Panizza, *Populism and The Mirror of Democracy*, London dan New York: Verso, 2005, hlm. 2

<sup>7</sup> Cas Mudde dan Cristóbal Rovira Kaltwasser, *Populism: A Very Short Introduction*, Oxford: Oxford University Press, 2017, hlm. 1

di baliknya. Istilah tersebut begitu cair karena dapat digunakan untuk membaca gerakan kiri dan demokratisasi (*left wing populism*) seperti yang terjadi di negara-negara Amerika Latin, sekaligus berlaku pula untuk ideologi yang sama sekali bersebrangan. Gerakan konservatif, anti demokrasi (*right wing populism*) juga merupakan bentuk populisme. Ernesto Laclau melihat bahwa populisme pada dasarnya tidak mengacu pada pengertian gerakan atau ideologi. Ideologi dan gerakan dalam populisme adalah unit-unit yang dianalisis. Populisme dapat dilihat sebagai praktik-praktik politis.<sup>8</sup>

Kajian mengenai populisme meliputi studi yang sangat luas dan beragam. Francisco Panizza membedakan tiga pendekatan yang dilakukan oleh para ilmuwan sosial dalam menganalisis konsep populisme. Perbedaan ini bukan bertujuan untuk melihat populisme dalam detail-detailnya melainkan bertujuan untuk menggarisbawahi persoalan-persoalan yang muncul dalam pendekatan-pendekatan yang berbeda. Ketiga pendekatan tersebut adalah a) generalisasi-generalisasi empiris, b) akun-akun historis, c) pembacaan-pembacaan simptomatik.<sup>9</sup> Panizza mencoba membandingkan pendekatan-pendekatan tersebut dalam menjelaskan populisme. Kategorisasi metodis yang dilakukan Panizza menunjukkan kompleksitas dari konsep populisme serta betapa luasnya studi mengenai populisme.

Pendekatan *pertama* adalah pendekatan generalisasi-generalisasi empiris. Pendekatan ini mencoba melihat gejala-gejala yang dicurigai sebagai populisme secara empiris, kemudian merumuskan definisi positif berdasarkan karakteristik-karakteristik yang spesifik dari fenomena-fenomena yang muncul. Pendekatan ini menghasilkan definisi-definisi yang sangat beragam mengenai populisme, yang seringkali tidak dapat ditemukan keterkaitannya. Asumsi-asumsi yang dihasilkan seringkali bukanlah asumsi yang terbukti dengan sendirinya (*self evident assumption*).<sup>10</sup>

Pendekatan *Kedua*, pendekatan akun-akun historis dilakukan dengan menghubungkan populisme dengan periode tertentu dalam sejarah, formasi sosial di dalamnya, proses sejarah atau keadaan sejarah tertentu. Pembacaan historis menghasilkan kajian yang luas mengenai populisme di Amerika Latin yang disebut sebagai era keemasan politik populisme (selain periode populisme kontemporer yang ditandai oleh terpilihnya Donald Trump). Pada periode tersebut muncul nama tokoh-tokoh kharismatik seperti Juan Domingo Peron dari Argentina, Getulio Vargas di Brasil dan Lazaro Cardenas di Meksiko. Interpretasi yang ketat mengenai populisme dalam pendekatan ini gagal memberikan penjelasan yang memadai karena membatasi diri dalam lingkup pembahasan yang sempit.<sup>11</sup>

Pendekatan *Ketiga*, Pendekatan simptomatik mengenai populisme berusaha

<sup>8</sup> Bdk. Ernesto Laclau, "Populism: What's in a name", Ibid, hlm. 32, 33

<sup>9</sup> Bdk. Ibid, hlm. 2

<sup>10</sup> Bdk. Ibid, hlm. 2,3

<sup>11</sup> Bdk. Ibid, hlm. 3

untuk menghubungkan beberapa ciri dan karakteristik dari populisme berdasarkan pendekatan empiris dan pendekatan sejarah tetapi memberikan penjelasan analitis mengenai inti dari konsep tersebut berdasarkan konstitusi masyarakat sebagai aktor politis. Populisme dipahami sebagai wacana anti status-quo yang melakukan simplifikasi mengenai ruang politik dengan membagi masyarakat secara simbolis sebagai “Rakyat” (*the people*) sebagai yang tertindas dan ada pada posisi yang lemah dengan “yang lain” (*the other*). Distingsi antara “rakyat” dengan “yang lain” adalah konstruk politik yang secara simbolik ditempatkan dalam hubungan antagonis. “Yang lain” adalah lawan bagi “rakyat”. Hubungan antagonistik ini terwujud dalam istilah-istilah politik dan ekonomi seperti ‘para politisi’ atau ‘pejabat senayan’, para ‘pemilik modal’, kaum ‘neolib’, ‘asing dan aseng’. Populisme adalah mode identifikasi yang dapat digunakan oleh setiap aktor politik.<sup>12</sup>

Wacana populisme digulirkan dengan permainan identifikasi yang menghasilkan oposisi biner antara ‘rakyat’ dan ‘elit’. Struktur identifikasi pada umumnya dibangun dengan mempertimbangkan unsur strategis yang matang. Para politisi memainkan peran mereka sebagai tokoh yang memperjuangkan kepentingan ‘rakyat’ dan siap melibas siapapun yang menghalangi kepentingan ‘rakyat’ untuk memperoleh kesejahteraan. Kesejahteraan rakyat adalah sesuatu yang dijanjikan oleh para tokoh populis. Strategi identifikasi dibangun dengan penguatan identitas pada masyarakat yang dituju. Identitas masyarakat yang disasar adalah mereka yang ada pada posisi paling strategis untuk meraih kekuasaan.

Pada dasarnya konsep populisme bukanlah konsep yang secara sederhana dapat dinilai baik atau buruk. Di satu sisi populisme mengakomodasi suara-suara atau pikiran-pikiran rakyat, serta memungkinkan perubahan-perubahan sosial. Populisme dapat bermakna positif apabila apa yang digaungkan dalam populisme adalah sesuatu yang menjadi refleksi bersama masyarakat yang mengupayakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Akan tetapi, pada masa kontemporer makna populisme lebih dilihat secara negatif karena pada praktiknya terwujud pada gerakan-gerakan reaksioner no-reflektif yang lebih mengedepankan sentimen-sentimen. Nuansa pragmatisme sangat terasa dalam populisme kontemporer.

### 3. Demokrasi dalam Pusaran Arus Populisme

Gejala populisme kontemporer lebih cenderung mengarah pada konservatisme. Pendulum populisme yang mengarahkan masyarakat untuk kembali ke nilai-nilai konservatif disebut sebagai populisme kanan atau ultra-kanan (dalam bentuk ekstrim). Dalam populisme ultra kanan, para pemimpin populis mengajak masyarakat untuk kembali pada nilai-nilai lama yang konservatif dengan memberi penekanan terhadap kemurnian-kemurnian (SARA dan ideologis). Para pemimpin

<sup>12</sup> Bdk. Ibid, hlm. 3, 4

populis gencar menyuarakan isu-isu tersebut dengan memberikan harapan bahwa kejayaan akan dicapai dengan konservatisme. Beberapa gerakan menyuarakan untuk mengganti pemerintahan demokratis untuk dijadikan pemerintahan berbasis agama. Dalam pemerintahan demokrasi terdapat paradox yang menarik. Demokrasi (khususnya di Indonesia) justru menjadi tempat bertumbuhnya organisasi dan gerakan anti demokrasi. Menariknya, gerakan-gerakan tersebut (baik organisasi maupun aksi) seringkali segera memakai tameng demokrasi serta langkah-langkah hukum demokratis ketika mendapat tuduhan-tuduhan melanggar regulasi.

Situasi tersebut merupakan bagian dari rangkaian rumit dalam pertautan antara demokrasi dan populisme. Demokrasi adalah sistem yang mengambil jarak dari sistem-sistem totaliter. Pemerintahan demokratis pada dasarnya adalah pemerintahan yang mengakomodasi suara masyarakat. Pertautan antara populisme dan demokrasi justru menghasilkan polarisasi dan disintegrasi masyarakat, dan mengkhianati sifat demokrasi yang diharapkan mampu menjadi tempat bagi masyarakat yang beragam. Demokrasi pada dasarnya adalah sistem yang mengakomodasi adanya keberagaman. Prosedur demokrasi yang diharapkan justru mampu menjadi jembatan bagi Demokrasi ternyata justru mengandung potensi tumbuhnya gerakan-gerakan konservatif yang cenderung abai terhadap keberagaman.

Konsep demokrasi dan populisme sendiri bukanlah dua konsep yang sangat terpisah. Kata 'demos' (Yunani: rakyat) kurang lebih memiliki makna yang sama dengan kata 'populus' (latin: rakyat). Dalam populisme kontemporer tersimpan potensi kengerian demokrasi yang ditulis Platon dalam Politeia. Demokrasi yang dipimpin oleh kerumunan yang dikuasai epithumea (hasrat dan nafsu-nafsu) akan mendorong masyarakat menuju kekacauan. Rakyat dalam Politeia digambarkan sebagai sekumpulan manusia yang tidak dapat mengendalikan dorongan-dorongan nafsunya sehingga akan sulit untuk mencapai keadilan.<sup>13</sup>

Sentimen kerumunan orang di Parlemen dilihat sebagai kerumunan yang berbahaya. Sokrates adalah salah satu korban bagi pengadilan rakyat yang dikuasai amarah tersebut. Keputusan-keputusan yang kurang dipertimbangkan dengan baik menjadi ciri dalam demokrasi a la Yunani kuno.<sup>14</sup> Demos yang digerakan oleh sentimen dan penuh amarah justru menjadi kekuatan utama dalam praktik populisme. Potensi sifat-sifat totaliter yang bertentangan dengan demokrasi berada pada masyarakat yang mendaku menjadi bagian dari demokrasi. Inilah paradoks dalam demokrasi. Demokrasi sebagai ideologi yang melampaui totaliterisme justru menjadi tempat bagi keberadaan rezim-rezim totaliter tersembunyi. Rezim totaliter tersebut menjadi tersembunyi karena demokrasi memungkinkan kebebasan dalam berpendapat, berpikir dan berorganisasi. Persoalannya negara-negara demokratis

---

<sup>13</sup> Bdk. Plato, *The Republic*, 492 a-c, terj. Tom Griffith, , Cambridge: Cambridge University Press, 2003, hlm. 195-196.

<sup>14</sup> Bdk. Budi Hardiman, *Demokrasi dan Sentimentalitas: Dari Bangsa Setan-Setan, Radikalisme Agama sampai Post-Sekularisme*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, hlm. 10.

yang berpadu dengan neoliberalisme memberi tekanan lebih pada kemutlakan individualisme. Ruang-ruang publik dan situasi komunal reflektif, tempat terjadinya perjumpaan dan diskusi reflektif yang menjadi mediasi bagi masyarakat semakin hilang. Media sosial memang berpotensi menjadi ruang publik akan tetapi di media sosial diskusi-diskusi rasional kritis jarang mendapat tempat. Orang yang hadir dalam media sosial lebih cenderung mengarahkan dirinya pada pilihan-pilihan identifikasi yang meminimalkan perjumpaan dan diskusi. Hal tersebut justru berpotensi menjadi ladang yang subur bagi tumbuhnya sentimentalisme.

Model negara hukum modern yang dirintis oleh para tokoh kontrak sosial sebenarnya telah menyediakan filter untuk sentimentalisme dalam wujud prosedur-prosedur demokratis. Akan tetapi saringan tersebutpun semakin koyak.<sup>15</sup> Koyaknya saringan tersebut juga terkait dengan ruang publik baru dalam bentuk digital yang lebih sulit untuk diawasi. Gerakan populisme yang menghidupkan sentimen tersebut melalui media, tampak dalam konten-konten yang disebarkan secara massif dan nampaknya terkoordinasi secara rapih. Masyarakat yang tidak kritis dan kosong oleh narasi-narasi kritis reflektif akan dengan mudah memakan konten-konten tersebut mentah-mentah. Mereka tidak menyadari bahwa dalam konten tersebut tersembunyi kepentingan politis yang pragmatis. Para pemimpin yang pragmatis membiarkan sentimen-sentimen tersebut tumbuh dan justru memupuknya, karena sentimen tersebut memberi keuntungan bagi posisi mereka.

Dalam demokrasi kebebasan berpendapat merupakan kemutlakan. Akan tetapi ruang-ruang kebebasan berpendapat justru diramaikan oleh kelompok-kelompok garis keras. Di Amerika kelompok garis keras tersebut menjadi kelompok yang menyuarakan anti-Islam dan Xenophobic. Di Indonesia atau di negara-negara Islam yang disuarakan adalah anti-sekularisme serta beberapa di antaranya mengangkat isu-isu Rasial, pribumi – nonpribumi. Kelompok-kelompok garis keras tersebut menyuarakan agenda-agenda politis mereka melalui sarana-sarana demokrasi meskipun agenda politis mereka sendiri pada dasarnya anti demokratis. Demokrasi adalah sistem politik yang tumbuh dari rasionalitas. Publik dapat memberikan kontrol atas kekuasaan sehingga kebebasan, kesetaraan, keadilan dan solidaritas dapat terwujud dalam masyarakat. Ukuran kesuksesan dari demokratisasi adalah pertumbuhan penalaran publik dan berkurangnya sentimentalitas.<sup>16</sup>

Populisme merupakan ancaman dalam demokrasi, karena meskipun menggunakan prosedur-prosedur demokratis, rezim populis dapat berubah bentuk secara dramatis menjadipemerintahan otoriter.<sup>17</sup> Pemerintahan Soeharto adalah tempat di mana proses demokratis menjadi mandul oleh rezim otoriter. Donald Trump

<sup>15</sup> Bdk. Ibid, hlm. 10

<sup>16</sup> Bdk. Ibid, hlm. 11-14

<sup>17</sup> Bdk. Benjamin Arditi, "Populism as an Internal Periphery of Democratic Politics, dalam Ed. Francisco Panizza, *Populism and The Mirror of Democracy*, hlm.77.

dan Erdogan adalah contoh sosok-sosok populis yang lahir dari rahim demokrasi dan menjadi cenderung otoriter.

#### **4. Populisme dalam Kebijakan Publik**

Gerak arus populisme dalam kebijakan publik nampak jelas dalam desakan-desakan kepentingan agama dalam kebijakan publik. Di Indonesia praktik populisme berbasis agama nampak dominan dalam mengkooptasi hidup publik. Praksis populisme yang sukses dapat menghasilkan gerakan-gerakan yang mendesak kebijakan publik. Aspirasi-aspirasi religius dalam masyarakat kita nampak dalam dukungan atas pemberlakuan perda-perda Syariah, pro kontra RUU Anti-pornografi dan Pornoaksi, sweeping di tempat-tempat hiburan malam pada waktu bulan Ramadhan, sampai pada pelarangan dan penyegelan tempat ibadah.<sup>18</sup> Kebijakan-kebijakan tersebut adalah kebijakan yang secara konstitusional dapat dipertanyakan. Kebijakan publik yang dikooptasi oleh paham ajaran agama tertentu dimungkinkan apabila dapat dijelaskan landasan-landasan rasional yang ada dibaliknya untuk diterima oleh semua pihak (yang plural), karena negara Indonesia bukanlah negara agama tetapi negara hukum demokratis.

Konstitusi Indonesia yang didasarkan pada UUD 45 tidak melegitimasi diri pada agama manapun, melainkan pada kedaulatan rakyat yang terdiri atas keanekaragaman cara hidup dan keyakinan. Karena tidak mendasarkan diri pada legitimasi agama manapun, integrasi sosial masyarakat kita akan sangat tergantung pada nilai-nilai rasional yang menjadi titik temu bagi berbagai agama. Titik temu itu dapat dibayangkan sebagai suatu ruang bersama tempat orang-orang bertindak tidak sebagai anggota umat atau jemaat agama tertentu, melainkan sebagai warga negara. Ruang itulah yang disebut sebagai ruang publik.<sup>19</sup>

Gerakan populisme kanan menjadi ancaman bagi negara hukum demokrasi karena kekuatannya untuk menekan parlemen, mendikte pemerintah, mengintimidasi pengadilan dan kepolisian.<sup>20</sup> Populisme kanan juga sangat berpotensi akan menjadi pemerintahan otoriter yang semakin melemahkan demokrasi. Kebijakan-kebijakan publik yang merupakan dorongan dari kekuatan-kekuatan populisme menjadi kebijakan kontroversial yang seringkali menjadi komoditas politik.

---

<sup>18</sup> Bdk. Budi Hardiman, *Demokrasi dan Sentimentalitas* hlm. 202-203

<sup>19</sup> Bdk. *Ibid*, hlm. 199

<sup>20</sup> Bdk. *Ibid*, hlm. 159

## 5. Penutup

Kebijakan publik dalam ide J.J. Rousseau merupakan representasi dari kehendak umum (*general will*). Pemikiran mengenai kehendak umum Rousseau dipisahkan dari kehendak-kehendak pribadi. Dalam masyarakat demokratis, Rousseau membayangkan bahwa kebijakan publik harus dibuat dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasional yang mengarah pada kebaikan bersama (bukan kebaikan individual atau golongan). Sementara praksis populisme yang berhasil mendesak pemerintah untuk menyetujui kebijakan tertentu dapat dikatakan merupakan pengkhianatan terhadap demokrasi.

Dalam teori diskursus dan demokrasi deliberatif Habermas menyarankan memaksimalkan *public use of reason* sebagai dasar bagi penentuan kebijakan publik. Rasio komunikatif yang dibedakan dari rasio strategis seharusnya menjadi semangkat yang mendasari penentuan kebijakan publik dalam negara hukum demokratis. Dalam tindakan komunikatif intensi yang ingin dicapai adalah pemahaman intersubjektif. Sementara itu gerakan-gerakan populisme justru melakukan komunikasi strategis yang seringkali manipulatif. Dimensi-dimensi ideal dan prosedural yang diusulkan oleh para penggagas demokrasi tersebut nampaknya berjarak dengan praksisnya. Populisme menerjang semua prosedur dalam sistem demokrasi.

Persoalan jarak antara dimensi ideal (prosedural) dan praksis demokratis ala populisme tersebut memiliki beberapa penyebab. *Pertama*, Pemerintahan demokratis yang dipengaruhi oleh kapitalisme dan neo-liberalisme masih menyisakan sederet persoalan sosial, yang membuat sistem demokratis itu sendiri seringkali dipertanyakan efektivitasnya dalam membentuk *bonum commune*. Kapitalisme sendiri merupakan bagian dari populisme budaya yang semakin menguasai kanal-kanal demokrasi, termasuk dalam memberikan pengaruh terhadap kebijakan publik. Kesenjangan sosial yang tinggi, persoalan ekonomi dan sosial yang membelit masyarakat akibat dari demokrasi pasar bebas ini menjadi energi terbesar bagi gerakan populisme kanan. Dalam demokrasi persoalan-persoalan ekonomi, seperti kesenjangan sosial, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, juga harus terus menerus dikaji untuk ditemukan solusi terbaik bagi semua. Negara memiliki peran sentral dalam mengupayakan hal tersebut.

*Kedua*, Demokrasi di Indonesia mengalami penyempitan makna. Seolah-olah demokrasi hanya berhenti pada aktivitas pencoblosan. Demokrasi harus dipahami sebagai rangkaian aktivisme sosial yang merupakan perpaduan antara solidaritas sosial yang inklusif, serta tindakan komunikatif. Dalam Demokrasi, Rakyat adalah pengawal dan penentu bagi jalannya pemerintahan. Demokrasi memungkinkan aspirasi-aspirasi masyarakat menjadi dasar bagi penentuan kebijakan. Solidaritas dalam demokrasi dapat diupayakan dengan menyuarkan persoalan-persoalan sosial (kemiskinan, ketidakadilan, penindasan) untuk diselesaikan secara prosedural-

al. Diskusi rasional dengan mengedepankan rasio komunikatif merupakan syarat mutlak agar 'demos' dapat menjadi penguasa yang sesungguhnya. Oleh karena itu perlu dibangun sarana-sarana yang memungkinkan 'demos' tidak sekedar menjadi kerumunan penuh amarah, tetapi menjadi orang-orang yang dapat berpikir secara rasional. Penulis mengusulkan untuk membentuk komunitas-komunitas reflektif yang dapat menghabituisasi masyarakat untuk sampai pada demokrasi yang sesungguhnya. Populisme yang rasional, inklusif dan komunikatif menurut hemat penulis justru akan menjadi pencapaian ideal bagi demokrasi.

*Ketiga*, hal yang seringkali diabaikan dalam model-model prosedural adalah masalah afeksi. Dimensi afeksi dalam demokrasi bagi penulis penting untuk diperhatikan. Dimensi afeksi tersebut akan sangat dipengaruhi oleh narasi-narasi yang hadir dalam keseharian masyarakat. Dalam hal ini penulis bermaksud menyinggung soal media (terutama elektronik) dan pendidikan yang kurang lebih menjadi pengisi bagi narasi masyarakat. Narasi-narasi antagonistik non-reflektif sebisa mungkin harus dikurangi. Narasi antagonistik non-reflektif dapat kita temukan dalam film-film heroik yang mengedepankan permusuhan. Hitam dan putih ditentukan secara mutlak dalam narasi-narasi tersebut. Film-film propaganda perang ala Amerika seperti *Commando* atau *Rambo* menghadirkan narasi antagonis yang tidak membuat masyarakat mampu berpikir reflektif. Model narasi antagonis non reflektif ini yang seringkali menginspirasi masyarakat untuk berpikir simplistik. Seolah-olah apabila ada persoalan kita cukup menemukan musuh kita dan melawan dia hingga kita menang, bahkan segala cara dihalalkan. Persoalan dianggap selesai ketika musuh sudah musnah. Model narasi macam ini yang menjadi pupuk bagi populisme yang mengancam demokrasi. Masyarakat justru harus diberikan narasi-narasi reflektif. Apabila kisah-kisah heroisme diberikan, maka heroisme tersebut justru harus mengedepankan aspek reflektif dan solidaritas alih-alih mengedepankan antagonisme yang dimutlakan.

## Daftar Pustaka

- Hardiman, Budi, *Demokrasi dan Sentimentalitas: Dari Bangsa Setan-Setan, Radikalisme Agama sampai Post-Sekularisme*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- Mudde, Cas dan Cristóbal Rovira Kaltwasser, *Populism: A Very Short Introduction*, Oxford: Oxford University Press, 2017.
- Panizza, Francisco (ed.), *Populism and The Mirror of Democracy*, London dan New York: Verso, 2005.
- Plato, *The Republic*, 492 a-c, terj. Tom Griffith, , Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

**Artikel**

- Denny Armandanu, *Mengenal PEGIDA Penggawa Aksi Anti Islam di Jerman*, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150106130903-134-22663/mengenal-pegida-penggawa-aksi-anti-islam-di-jerman>, diakses pada 30 Oktober 2018 pukul 01.21
- Mutia Fazia, *Kebijakan-Kebijakan Trump yang Mengguncang Ekonomi Global*, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/19/063000726/kebijakan-kebijakan-trump-yang-mengguncang-ekonomi-global>. Diakses pada 30 Oktober 2018 pukul 02.15
- Ed. Pascal S. Bin Saju, *Hasil Penelitian: 2,3 juta Warga Inggris Menyesal Telah Memilih Brexit* <https://internasional.kompas.com/read/2016/07/01/22000611/hasil.penelitian.2.3.juta.warga.inggris.menyosal.telah.memilih.brexit>. Diakses pada 30 Oktober 2018 pukul 02.00
- Ted Regencia, <https://www.aljazeera.com/news/2018/02/senator-rodrigo-duterte-drug-war-killed-20000-180221134139202.html>. Diakses pada 30 Oktober 2018 pukul 01.20
- Shinta Maharani, <https://nasional.tempo.co/read/1047180/alissa-wahid-cemas-kan-sentimen-agama-dalam-pilkada-dan-pilpres/full&view=ok>. Diakses pada 30 Oktober 2018 pukul 02.00